



Journal of Government and Politics (JGOP) ISSN:2686-3391

Vol. 2 No. 1 Juli 2020

Journal of Government and Politics (JGOP)

<http://journal.ummat.ac.id/index.php/jsip>



ALOKASI ANGGARAN PENGELOLAAN OBJEK DAYA TARIK WISATA (ODTW) ALAMI DI DESA AIK BERIK KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Baiq Vatriani Sasa Wisesa¹, Ayatullah hadi², Darmansyah³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 06-05-2020

Disetujui: 05-07-2020

Dipublikasikan : 21-07-2020

Kata Kunci :

Alokasi anggaran,
Pengelolaan Pariwisata,
Objek Wisata.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian anggaran pada pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) alami di Desa Aik Berik Lombok Tengah. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptik kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunakan teknik Miles dan heberman, yaitu mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Pengalokasian anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna Pengembangan Pariwisata, pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengalokasian anggaran untuk Pengebangan Obyek Daya Tarik Wisata Alami di Desa Aik Berik Lombok Tengah belum menjangkau semua aspek. Anggaran yang dialokasikan hanya sebatas anggaran Sarana Prasarana pembutaan jalan penghubung antara jalan desa dan kecamatan, namun pengalokasian anggaran belum mencakup anggaran lain, seperti anggaran pengembangan pariwisata, anggaran promosi wisata, anggaran perawatan dan anggaran-anggaran untuk pemeliharaan tempat wisata. Dalam pengalokasian anggaran OTDW Desa Aik Berik memiliki mekanisme yang ketat dan prosesnya panjang sehingga anggaran tersebut bisa terealisasi. Seperti memetakan potensi wisata, adanya otorisasi pengalokasian anggaran yang harus memiliki dasar hukum, keterlibatan aktor kebijakan, adanya perencanaan pengalokasian anggaran, merumuskan agenda kegiatan, setelah itu dibentuk pengawasan pengalokasian anggaran yang memiliki kewenangan untuk mengawas setiap tahapan proses pembangunan proyek sarana prasana Obyek Daya Tarik Wista (ODTW) alami Desa Aik berik dan terakhir dilakukan evaluasi

untuk mengetahui seluruh proses pembanguna tersebut terealisasi dengan baik atau ada penyimpangan.

ALLOCATION OF NATURAL OBJECT ATTRACTION (ODTW) BUDGET MANAGEMENT IN AIK BERIK VILLAGE, NORTH BATUKLIANG DISTRICT, CENTRAL LOMBOK DISTRICT

Abstract

This study aims to determine the budget allocation on the management of natural Attraction Attraction (ODTW) in the village of Aik Berik, central Lombok. The study used a qualitative descriptive method using data collection techniques such as interviews, documentation and observation. Data analysis using the technique of Miles and Heberman, namely starting data collection in the field, data reduction, data presentation until drawing conclusions. Budget allocation is a financial plan that systematically shows the allocation of human, material, and other resources. Various variations in the government budgeting system were developed to serve a variety of purposes including Tourism Development, financial control, management plans, priorities for using funds, and accountability to the public. The results of the study showed that the budget allocation for the cutting down of natural tourist attraction objects in the village of Aik Berik in central Lombok had not yet reached all aspects. The budget allocated is only limited to the Infrastructure Infrastructure budgeting of connecting roads between village and sub-district roads, but the budgeting of budgets does not include other budgets, such as tourism development budgets, tourism promotion budgets, maintenance budgets and budgets for maintaining tourist attractions. In allocating the OTDW budget, Aik Village has a strict mechanism and a long process so that the budget stages can be realized. Such as mapping the tourism potential, the existence of budget allocation authorization that must have a legal basis, the involvement of policy actors, the existence of budget allocation planning, formulating the agenda of activities, after which a budget allocation supervision is formed which has the authority to oversee every stage of the development process of the Wista Attraction Object infrastructure project (ODTW) Aik Village naturally berik and finally conducted an evaluation to find out the entire development process is realized properly or there are irregularities

2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik_Ummat

*Alamat Korespondensi:

¹ baiqsesa@gmail.com

² hadi.ayatullah@yahoo.co.id

³ Darmansyah.ai59@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam adat, suku, budaya, flora, fauna serta keindahan alam. Dengan demikian, daya tarik pariwisata Indonesia sangatlah tinggi. Perkembangan pariwisata Indonesia terus meningkat dimana hal tersebut tentu memberikan dampak yang positif bagi bangsa Indonesia, karena menghasilkan keuntungan bagi perekonomian. Sektor pariwisata memang memiliki peran yang besar dalam menyokong pembangunan dan perekonomian suatu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika sektor pariwisata ini mampu dikelola dan dikembangkan secara maksimal, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan usaha baru, membuka lapangan kerja baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun untuk membangun Pariwisata yang menarik dikunjungi, tentu Pemerintah membutuhkan penganggaran yang terencana sehingga aspek-aspek yang dibutuhkan dalam sektor Pariwisata terpenuhi, dan mampu mendongkrak ekonomi. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna Pengembangan Pariwisata, pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Mekanisme penganggaran sektor pemerintahan cukup kompleks dan tidak terlepas dari unsur politis. Kompleksitas tersebut merupakan muara dari sulitnya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginan-keinginan yang tidak terbatas, dan sangat beragam termasuk dalam pengalokasian anggaran sektor Pariwisata. Sektor pariwisata Indonesia terus meningkat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data publikasi dari WTTC (*World Travel and Tourism Council*), Indonesia menempati peringkat ke 9 (Sembilan) dan mengungguli Negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand di peringkat 12, Filipina dan Malaysia di peringkat 13, Singapura diperingkat 16, serta Vietnam di peringkat 21. Daya tarik pariwisata adalah hal-hal yang menarik perhatian wisatawan yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata, di samping harus ada objek dan atraksi wisata, juga harus memiliki tiga syarat daya tarik. (a). ada sesuatu yang yang bisa dilihat (*something to see*), (b). ada sesuatu yang dapat dikerjakan (*something to do*), (c). ada sesuatu yang bisa dibeli (*something to buy*).

Dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Pengelolaan pariwisata sendiri dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman sehingga wisatawan dapat tinggal lebih lama di lokasi wisata dan membelanjakan uangnya sebanyak mungkin selama berwisata. Dalam UU No.10 Tahun 2009

tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata terdapat 4 pilar untuk mengembangkan sektor pariwisata, yaitu: destinasi pariwisata, pengembangan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan kelembagaan pariwisata. Dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. mengemukakan sarana prasarana yang memadai menjadi kunci untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, dan Pengelolaan pariwisata sendiri dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman.

Yang dimaksud alokasi anggaran untuk pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata dalam konteks keamanan (sekuritas) dan kenyamanan (aminitas) yaitu berupa: akses (jalan, kemudahan rute dan tempat parkir), fasilitas kesehatan, *catering service*, pembelanjaan (tempat pembelian barang - barang umum), komunikasi, sarana ibadah, fasilitas kebersihan, jaminan keamanan dan pelayanan tambahan lainnya. Penelitian ini fokus pada pengalokasian anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan pariwisata secara maksimal agar dapat mencapai target pemerintah terutama Pemerintah Daerah Lombok Tengah yaitu aminitas dan sekuritas di lokasi wisata. Pengembangan disini bukan berarti merubah secara total, namun lebih kepada mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, yang mana potensi tersebut dikemas menjadi suatu Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Begitu juga halnya dengan Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang jika dikembangkan dan dikelola sebagai Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) secara maksimal dapat memberikan banyak manfaat baik untuk masyarakat setempat maupun pemerintah daerah.

Namun fakta menunjukkan bahwa pengelolaan objek daya tarik wisata di Desa Aik Berik belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah hanya mengalokasikan anggaran untuk pengadaan fasilitas standar. Sedangkan untuk biaya pemeliharaan dan honor pengelola dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat dari hasil pemungutan parkir dan karcis. Sehingga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Lombok Tengah demi keamanan dan kenyamanan wisata di Desa Aik Berik. Dan Masih banyak kekurangan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan objek daya tarik wisata alam di Desa Aik Berik. Seperti kurangnya fasilitas tambahan berupa akses roda empat menuju wisata Air Terjun dan petugas kebersihan rutin

disetiap objek wisata alam, penataan lokasi wisata, dan lain-lain. Hal tersebut juga seharusnya masuk dalam alokasi anggaran yang disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive, yang artinya informan di tentukan dengan pertimbangan tujuan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak yang mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata di Lombok Tengah. Yaitu, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Kepala Desa Aik Berik, Pengelola Desa Aik Berik dan Masyarakat pengunjung (wisatawan). Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti adalah *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya kecil kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar

HASIL DAN PEMBAHASAN

A). Potensi Wisata

Demi memudahkan kajian dan fokus terhadap objek yang akan diteliti terkait pengelolaan anggaran pariwisata di Lombok Tengah, peneliti mencoba memetakan beberapa hal yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka peningkatan kunjungan wisata di Lombok Tengah khususnya di Desa Aik Berik, seperti memetakan potensi wisata, otorisasi pengalokasian anggaran, dasar hukum, aktor kebijakan, agenda kegiatan, pengawasan pengalokasian anggaran dan evaluasi alokasi anggaran.

Penduduk Desa Aik Berik pada umumnya merupakan pendatang dari desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah, pada awalnya mereka datang ke desa Aik Berik untuk menjadi petani dan pekerja di kawasan hutan, karena pada umumnya penduduk Desa Aik Berik berasal dari kalangan non bangsawan, maka masyarakat Desa Aik Berik merupakan masyarakat yang memiliki nilai-nilai adat budaya suku sasak yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hidup di masyarakat Desa Aik Berik. Keadaan sarana dan prasarana Desa Aik Berik dengan desa lainnya masih belum terlalu bagus, dari lima ruas jalan yang ada, hanya satu ruas jalan yang diaspal, dan tiga ruas lainnya masih belum diperbaiki (berlubang, becek dan berdebu). Sarana transportasi umum yang menghubungkan Desa Aik Berik dengan pusat Kecamatan Batukliang Utara yaitu, Ojek dan mobil angkutan desa, dan beberapa obyek wisata yang ada di Desa Aik Berik antara lain (a). Air Terjun Benang Stokel (b). Air Terjun Benang Kelambu (c). Air Terjun Batu

Pertapa/makam jenggot (d). Obyek Wisata Jembatan Maiq Meres. Beberapa potensi wisata di atas merupakan daya tarik tersendiri yang dimiliki Desa Aik Berik, yang merupakan desa sentra produksi buah, karena desa Aik Berik tepat berada pada kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Jika dikelola dengan baik dan anggaran pengeloan di distribusikan dengan terukur untuk membangun sarana dan prasarana yang memadai, Desa Aik Berik akan menjadi Desa Wisata terbaik dan menjadi desa contoh wisata alam (ekowisata).

B). Otorisasi Pengalokasian Anggaran

Dalam otorisasi pengalokasian anggaran terdapat dasar hukum yang menjadi acuan/pedoman untuk mengalokasi dan mendistribusikan anggaran yang telah disepakati untuk pembangunan di suatu daerah. Dalam hal ini, sama seperti penganggaran pada umumnya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan penganggaran untuk pengelolaan pariwisata di Desa Aik Berik yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu sesuai visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, maka fokus pembangunan di arahkan di tiga sektor prioritas pembangunan, diantaranya sektor pertanian, perikanan dan pariwisata atau yang dikenal dengan ATM (*Agriculture, tourism, marine*) dengan membagi pengembangan kawasan menjadi tiga zona, dan mengedepankan prinsip pembangunan yang berbasis kawasan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. Dimana Desa Aik Berik masuk dalam zona prioritas bagian utara Kabupaten Lombok Tengah dengan potensi unggulan bidang *Agriculture and Tourism*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala bagian Perencanaan Pariwisata Lombok Tengah mengungkapkan “Untuk dasar hukum dalam pengalokasian anggaran pengelolaan sama seperti penganggaran di dinas lain, di dalam anggaran pemerintah daerah ini acuannya adalah RPJMD, Renstra, dan Renjadis tahunan. Renjadis ini yang diverifikasi, dikonsultasikan, dan dikoordinasikan dengan Bappeda dan Tim Keuangan Daerah kemudian ditetapkan anggaran yang akan dialokasikan. Setelah Renjadis disetujui, Dinas Pariwisata menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang bersifat lebih detail. Setelah RKA disetujui, dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Jadi berdasarkan itulah acuan berapa anggaran yang riil untuk setiap pembangunan. Selain APBD, anggaran pariwisata juga bersumber dari DAK”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Strategis (renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD periode 5 (lima) tahunan yang memiliki 3 tujuan utama

- a). Sebagai acuan atau dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada setiap tahun anggaran;
- b). Sebagai alat penyeleksi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dengan dinas atau satuan kerja yang terkait;
- c). Sebagai alat pengendali dan evaluasi program dan kegiatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program.

Setelah penyusunan renstra tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menyusun Rencana Kerja Dinas (Renjadis) yang disusun setiap 1 tahun sekali. Rencana Kerja Dinas ini yang kemudian diverifikasi, dikonsultasikan, dan dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Tim Keuangan Daerah. Lalu ditetapkanlah berapa anggaran yang dibutuhkan. Setelah disetujui, Renjadis Pariwisata tersebut yang dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang bersifat lebih detail. Yang dimaksud dengan lebih detail yaitu dengan mencantumkan sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) seperti penyediaan toilet, shelter, parkir dan lain – lain. Dan setelah itu Dinas Pariwisata Lombok Tengah mengusulkan rencana kegiatan, dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata akan melakukan penilaian terhadap rencana kegiatan tersebut. Persetujuan berupa RK yang bersifat umum dari Kementerian Pariwisata yang ditanda tangani bersama oleh pihak Kementerian Pariwisata, pemerintah daerah, dan BAPPEDA. Berdasarkan RK tersebut, Dinas Pariwisata menyusun RKA sesuai dengan standar biaya di daerah. Termasuk didalamnya luas pembangunan, biaya tim, biaya monev, rapat, dll. Selanjutnya, setelah RKA tersebut disetujui, disusunlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan DPA tersebutlah dapat dilihat berapa total anggaran riil untuk setiap kegiatan pengelolaan OTDW di Kabupaten Lombok Tengah.

Selain dari APBD, dana untuk pariwisata juga bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pariwisata. DAK didapatkan Dinas Pariwisata Lombok Tengah dengan mengusulkan rincian rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan tercantum dalam DAK. Yang menentukan menu kegiatan tersebut adalah Kementerian Pariwisata. Seperti pembangunan sekuritas dan amenitas pariwisata di Desa Aik Berik dengan melampirkan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata. Salah satu syaratnya seperti, Desa Aik Berik yang memiliki kawasan yang merupakan tanah milik pemerintah dan rencana pembangunan harus sesuai menu kegiatan Kementerian Pariwisata. Dan memiliki Fasilitas yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi. Pelaksanaan fasilitasi dapat dibantu oleh pihak lain, seperti (a). perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian

masyarakat, (b). lembaga swadaya masyarakat, (c). Lembaga keuangan, (d). Koperasi, (e) BUMN/BUMD/BUMS. Berikut Tabel data APBDES Desa Aik Berik 2016-2017 :

TABEL 1
DATA APBD DESA AIK BERIK

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2016	1.862.483.802.48	1.862.483.800	-
2	2017	2.098.323.741.42	2.098.323.700	-

Sumber : APBDes Aik Berik Tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa pada tahun 2016, Desa Aik Berik memiliki target penganggaran mencapai Rp.1.862.483.802.48 dan yang terealisasi sejumlah Rp. 1.862.483.800. Sedangkan berbeda dengan tahun 2017, dimana Desa Aik Berik meningkatkan target anggarannya jauh dibandingkan tahun 2016 yaitu mencapai Rp. 2.098.323.741.42 sehingga yang terealisasi pun lebih banyak dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 2.098.323.700.

C. Aktor Kebijakan

Setelah dasar hukum dalam pengalokasian anggaran, peran dari para aktor kebijakan dalam suatu pengalokasian anggaran juga tak kalah penting. Berdasarkan peraturan yang berlaku pada pengalokasian anggaran untuk pengelolaan ODTW alam Desa Aik Berik melibatkan berbagai pihak, sebagaimana Pernyataan kepala Desa Aik Berik menyampaikan pihak-pihak yang terlibat pengalokasian anggaran untuk obyek daya tarik wisata antara lain Kementerian Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lombok Tengah, Dinas Pariwisata Lombok Tengah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Konsultan Pengawas, dan Pemerintah Desa dan pihak pengelola, dari berbagai pihak tersebut harus saling bersinergi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berikut Tabel aktor kebijakan atau *stakeholder* yang terlibat dalam pengalokasian anggaran Obyek Daya Tarik Wisata Desa Aik Berik

Tabel 2
AKTOR KEBIJAKAN PENGALOKASIAN ANGGARAN PENGELOLAAN WISATA ALAM
DESA AIK BERIK TAHUN 2019

NO	INSTANSI/AKTOR	PERAN
1	Kementrian Pariwisata	Mengesahkan dan menilai RK Dinas Pariwisata Lombok Tengah.
2	Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah	Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) sekaligus melakukan <i>monitoring and evaluation</i> .
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Member izin pada petani untuk mengelola hasil hutan (dalam kawasan HKm) dan turut melakukan pengawasan karena beberapa ODTW alam aik berik termasuk dalam kawasan HKm.
4	Bappeda Lombok Tengah	Mengesahkan RKA dan melakukan <i>monitoring</i> .
5	Pemerintah Desa Aik Berik	Memfasilitasi petani HKm dalam bercocok tanam dan mengalokasikan anggaran melalui BUMDes untuk usaha sektor pariwisata
6	Konsultan Pengawas	Mendesain sarana prasarana ODTW dan menentukan <i>budget</i> yang harus dialokasikan oleh pemda.
7	Pihak Pengelola ODTW alam Desa Aik Berik	Mengelola agar memberi rasa aman dan nyaman pada wisatawan ODTW alam di Desa Aik Berik.

Sumber : Di Olah oleh Peneliti: 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa baik pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa serta *stakeholder* lainnya sama-sama memiliki peran yang penting dan harus saling bersinergi agar dapat mencapai target pembangunan daerah yang tidak lain adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat setempat khususnya warga Desa Aik Berik dengan potensi ODTW alamnya.

D. Perencanaan pengalokasian Anggaran

Dalam merencanakan pengalokasian anggaran untuk suatu daerah, pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai demi mewujudkan pemanfaatan potensi dari masing – masing daerah tersebut secara maksimal. Dari hasil penuturan Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata Lombok Tengah, mengungkapkan bahwa selain pertanian dan perikanan sektor Pariwisata merupakan bagian dari pembangunan prioritas Kabupaten Lombok Tengah khususnya di Desa Aik Barik yang tertuang dalam visi misi Lombok Tengah, yaitu fokus pembangunan di arahkan pada tiga sektor, pertanian, perikanan dan pariwisata atau yang di kenal ATM (*agriculture, tourism, and marine*). sektor selain ATM digunakan sebagai pendukung ketiga sektor tersebut. Sektor Pariwisata(*Tourism*) ini memiliki *multiplayer effect* (efek berganda) yang tentunya berdampak pada perekonomian masyarakat setempat. Sehingga sesuai dengan tujuan dialokasikan anggaran yaitu mampu mengentaskan kemiskinan, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan peluang usaha, dll demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian dapat kita pahami perlu adanya infrastruktur yang baik dan fasilitas yang memadai untuk mencapai tujuan pengalokasian anggaran pengelolaan ODTW. Kebijakan dengan konsep pengembangan wilayah sesuai potensinya akan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, juga turut membantu dalam mengangkat nilai dari pendapatan asli daerah. Dari hal tersebut, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu sesuai visi dan misi Kabupaten Lombok Tengah, maka fokus pembangunan di arahkan di tiga sektor prioritas pembangunan diantaranya sektor pertanian, perikanan dan pariwisata atau yang dikenal dengan ATM (*Agriculture,tourism,marine*) dengan membagi pengembangan kawasan menjadi tiga zona dengan lebih mengedepankan prinsip pembangunan yang berbasis kawasan dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. dimana Desa Aik Berik masuk dalam zona prioritas bagian utara Kabupaten Lombok Tengah dengan potensi unggulan bidang *Agriculture and Tourism*.

E. Agenda Kegiatan.

Dalam perencanaan alokasi anggaran, terdapat suatu agenda kegiatan yang nantinya akan diwujudkan sesuai dengan anggaran yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa RKA yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Program kerja yang ditujukan untuk Desa Aik Berik sendiri terdapat dalam Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Perkiraan Maju Tahun 2019, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah. Di dalamnya tercantum

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya termasuk Desa Aik Berik sesuai dengan DED Tahun 2017 Pembangunan ODTW Kawasan Utara yang bersumber dari DAK yaitu sejumlah Rp. 550.000.000.

Tabel 3

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

BIDANG PENGEMBANGAN							
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				1,550,000,000			
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Terlaksananya Rehab Kolam Pemandian Aik Bukaq, Penataan Kawasan Kolam Pemandian Aik Bukaq berdasarkan DED 2017	Aik Bukaq	1 paket	400,000,000	APBD II dan DAK		550,000,000
	Pembangunan ODTW Kawasan Utara						
	Terlaksananya pengembangan kawasan wisata Benang Setokel dan Aiq Berik berdasarkan DED 2017	Aik Berik	1 paket		DAK		
Pembangunan ODTW Kawasan							

	Utara						
	Tertatanya jalur tracking dan Rinjani dan terpasangnya railing dari Pelawangan Segara Anak	Gunung Rinjani	1 paket	350,000,000	APBD II		377,300,000
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Obyek wisata di Lantan Mas-Mas, Embung Bual	Desa Lantan, Mas mas, Embung Bual	3 paket	225,000,000	APBD II		330,000,000
	Terbangunnya Dermaga Pariwisata dan konektivitas ODTW di selatan Lombok Tengah (Bumbang, Mawi, Gerupuk dan Are Guling)	Bumbang, Mawi Gerupuk, Areguling	4 paket		DAK		
	Tersedianya Shelter, Toilet, Sumur Bor dan Tertatanya Tempat Parkir di ODTW Pengembangan (baru)	Embung Bual, Lantan, Lancing, Are Guling dan Mawun	5 Paket	500,000,000	APBD I		

Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Terselenggaranya sosialisasi, pembinaan, dan standarisasi hotel dan restoran	Lombok Tengah	1 kali	75,000,000	APBD II		71,500,000
--	--	---------------	--------	------------	---------	--	------------

Sumber: Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa dalam pengalokasian pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata alam di Desa Aik Berik hanya dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, namun tidak terdapat alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana wisata tersebut. Pemeliharaan objek daya tarik wisata di Desa Aik Berik masih bersifat swadaya oleh masyarakat setempat. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Karena jika sarana dan prasarana tersebut tidak dikelola dengan maksimal dalam hal ini yaitu pemeliharaan, tentu akan berpengaruh pada faktor kenyamanan dan keamanan bagi para pengunjung/wisatawan di lokasi objek daya tarik wisata Desa Aik Berik.

Untuk Rencana Kerja Pembangunan di Desa Aik Berik sendiri, memiliki beberapa bidang pembangunan sebagaimana yang dituturkan Kepala BUMDes menyatakan, Alokasi anggaran khususnya untuk sektor pariwisata di Desa Aik Berik yang bersumber dari APBDes dan dikelola melalui BUMDes berkisar 10% dari jumlah keseluruhan Dana Desa yang ada untuk mendukung agenda kegiatan sektor pariwisata di Desa Aik Berik. Sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 4
Rencana Kerja Pembangunan Desa Aik Berik Tahun 2018

N O	RENCANA PEMBAN GUNAN/BI DANG	URAIAN KEGIATAN	VOL UME	SUMB ER DANA	SIFAT	DANA	REALI SASI
1	Bidang Penyeleng garaan	Pembayaran Siltap dan Tunjangan		ADD	RUTINI TAS	791,937,320.00	

	Pemerintah an Desa	Operasional BPD					
		Kegiatan RT					
		Operasional Perkantoran					
		Pelaporan Kegiatan					
2	Bidang Pembangunan Desa	Pembangunan Rabat Jalan		DD	Sesuai Aturan	1,086,480,000.00	
		Pembangunan Talud Jalan					
		Pengkeras Jalan					
		Penataan Pemukiman					
		Pembangunan Drainase Desa					
3	Bidang Pembinaan Kelembagaan Desa	Kegiatan PKK, LKMD, KTI, Lembaga Adat. Forkompindes, BKD, Pol.PP		ADD	Sesuai Aturan	161,312,400.00	
4	Bidang Pemberdayaan masyarakat desa	Pelatihan Pemberdayaan Stap dan warga masyarakat		DD	Sesuai Aturan	426,465,000.00	
5	Penyertaan Modal	Menjalankan Kegiatan BUMDES (10% untuk sektor pariwisata Aik Berik)		DD	Sesuai Aturan	165,071,048.85	

Sumber: RKPDes Aik Berik Tahun 2018

Berdasarkan data tabel dan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pengalokasian anggaran untuk agenda kegiatan sektor pariwisata sejumlah Rp.165,071,048.85 yaitu sekitar 10% dari keseluruhan dana APBDes Aik Berik. Namun dana tersebut digunakan khusus untuk kegiatan yang menyangkut bidang usaha sektor pariwisata bukan untuk peningkatan sekuritas dan aminitas pariwisata, dikarenakan pengalokasian anggaran pembangunan khusus bidang pengembangan pariwisata yaitu sarana pasarana sekuritas dan aminitas merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah dan pengalokasian anggaran tersebut tercantum dalam Rumusan Rencana Program Kegiatan SKPD Tahun 2018 Dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah.

F. Pengawasan Pengalokasian Anggaran

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait bentuk pengawasan pengalokasian anggaran untuk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Desa Aik Berik, pengawasan dilakukan untuk supaya program kerja yang sudah direncanakan bisa berjalan efektif dan efisien dan mencapai tujuan. Ada dua aktor yang diberikan tanggung jawab terhadap pengawasan pengalokasian anggaran ODTW, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Aik Berik. *Pertama*, dari tim pengawas dari konsultan pengawas yang telah ditunjuk Pemerintah Daerah Lombok Tengah. *Kedua*, Tim Monitoring dan Evaluasi dari pemerintah daerah. Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah menunjuk konsultan pengawas yang merupakan perusahaan atau badan Hukum untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan proyek Kawasan Utara yaitu objek daya tarik wisata di Desa Aik Berik. Tujuan di tunjuknya pihak ketiga atau Konsultan agar kerja-kerja pengawasan bisa berjalan sesuai yang sudah ada dalam gambar kerja atau *backstage* yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Adapun tugas-tugas dari konsultan pengawas tersebut adalah :

- a). Mengawasi dan memeriksa mutu pekerjaan kontraktor agar memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.
- b). Mengawasi dan menguji kualitas atau mutu bahan.
- c). Menyiapkan dan menghitung kemungkinan terjadinya adanya pekerjaan tambahan atau pekerjaan yang kurang.
- d). Memberi teguran kepada kontraktor jika pelaksanaan pekerjaan diluar dari spesifikasi gambar-gambar revisi.
- e). Memeriksa gambar-gambar revisi.

f). Menyusun laporan harian, mingguan, dan bulanan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan selama pengawasan.

Gambaran yang dibuat oleh konsultan pengawas tersebut selanjutnya disahkan oleh PU sebagai pihak perwakilan dari pemerintah yang memahami secara teknis pembangunan tersebut. Setelah disahkan, diserahkan pada pihak pelaksana. Dimana pihak pelaksana harus membangun sesuai dengan gambar dari pihak konsultan pengawas. Dalam pelaksanaan tersebut ada pengawasan dari pemerintah daerah apakah sudah sesuai atau tidak.

E. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses akhir dalam suatu implementasi kebijakan yang mana evaluasi tersebut menunjukkan hasil apakah program kerja sesuai dengan target atau tidak. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa Aik Berik, bahwa setelah selesainya proyek sarana prasarana Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Desa Aik Berik Selesai akan ada tim yang melakukan evaluasi dan tim pemeriksaan pekerjaan akhir proyek ditunjuk langsung oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah yang disebut dengan Tim PHO (*Provisional Hand Over*) atau biasa disebut dengan tim penyerahan pekerjaan sementara dan FHO yaitu tim penyerahan akhir pekerjaan.

Setelah proses akhir masa pelaksanaan konstruksi selesai, dilakukan Serah Terima Pertama atau *Provisional Hand Over* (*PHO*) antara Kontraktor Pelaksana yang telah di tunjuk oleh pemda Lombok Tengah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, dan bila berakhir masa Pemeliharaan, maka dilakukan *Final Hand Over* (*FHO*) atau Serah Terima Akhir. Penyerahan proyek selesai dari kontraktor kepada direksi pekerjaan diatur sesuai dengan tata cara meliputi persyaratan dan prosedur yang diatur dalam dokumen kontrak yang mana dalam hal ini mengacu pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang telah disusun oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah. Kontraktor dapat mengajukan permohonan serah terima pekerjaan setelah pekerjaan selesai 100% untuk penyerahan pertama pekerjaan (*provisional hand over/PHO*). Penerimaan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari kontraktor. Hasil pekerjaan tetap berada seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan penyerahan akhir pekerjaan (*final hand over/FHO*) proyek pengadaan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam pengalokasian anggaran untuk Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Desa Aik Berik belum maksimal, hal tersebut disebabkan alokasi anggaran hanya sebatas untuk membangun sarana prasarana penunjang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Alokasi anggaran belum menyentuh hal substansi, seperti anggaran Perawatan Obyek Wisata, anggaran Pengembangan Pariwisata, anggaran Promosi desaWisata dan anggaran lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemeliharaan Obyek Daya Tarik Wisata Aik Berik. Namun dalam prosesnya alokasi anggaran untuk OTDW memiliki mekanisme yang cukup ketat dan harus melalui prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Lombok Tengah Melalui Dinas Pariwisata, antara lain prosedur tersebut, memetakan potensi wisata, otorisasi pengalokasian anggaran, memetakan aktor kebijakan yang terlibat dalam pengembangan OTDW Desa Aik Berik, perencanaan pengalokasian anggaran yang memiliki tujuan yang jelas, yang tertuang dalam agenda kegiatan dan di kontrol oleh pengawasan pengalokasian anggaran yang dibentuk oleh Dinas Pariwisata Lombok Tengah menunjuk konsultan atau badan hukum yang diberi kewenangan dalam pengawasan pembangunan Obyek Daya Tarik wisata Desa Aik Berik dan terakhir dilakukan tahap evaluasi untuk mengetahui realisasi pengalokasian anggaran OTDW terealisasi dengan baik atau ada penyimpangan dalam proses pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- DarwantodanYustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Makassar: Simposium Nasional Akuntansi.
- Karyono, Hari. 1997. *Kepariwisata*. Jakarta: PT Grasindo
- ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Lestanata, Y., & Zitri, I. (2020). Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *Journal of Governance and Local Politics*, 2(1), 25-47.
- Sinaga, S. (2010). Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Suminto. 2004. *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Jakarta: Ditjen Anggaran, Depkeu.
- Sahdan. 2018. *Profil Desa Aik Berik Tahun 2018*. Kantor Desa Aik Berik.
- Santri.2009. Analisis mengenai potensi sektor pariwisata untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.Di unduh tanggal 23 November 2018
- Yuni Ratna Sari dkk.2013. Model Pengentasan Kemiskinan Desa Pesisir Melalui Optimasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan Kelembagaan Desa. Diunduh tanggal 23 November 2018
- DPA (Dokumen Pelaksana) SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No. 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 – 2021.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.
- Peraturan menteri keuangan No. 113/PMK/2010 tentang Dana Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah.
- Peraturan Menti Pariwisata Republik Indonesia No. 06 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pariwisata
- PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Renjadis (Rencana Kerja Dinas) SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
- Renstra (Rencana Strategis) SKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Journal of Government and Politics (JGOP) *Vol. 2 No. 1 Juli 2020* Hal. 20-38
RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah.
RKPDes Aik Berik Tahun 2018.
RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
(<https://www.indonesia-investments.com>, diakses tanggal 20 November 2018).